#### BAB V

### **PENUTUP**

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

Dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat dalam pembangunan wisata ini disebabkan karena Pemerintah Desa tidak melibatkan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wisata. Adanya konflik ini bermula pada saat terjadinya consensus antara Pemerintah Desa dengan masyarakat pada rapat RPJMDes tahun 2020. Dimana pada consensus tersebut, telah disepakati akan dilakukannya pembangunan wisata. Sesuai dengan pendapat Ralf Dahrendorf bahwa timbulnya konflik yang ada di masyarakat berasal dari consensus yang telah ada sebelumnya. Consensus ini berpotensi menimbulkan konflik yang didasari pada berbagai kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Konflik yang melibatkan Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat ini disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk mengatur dan memerintah sekelompok masyarakat untuk mentaati keputusan yang telah dibuat. Namun dengan posisi yang dimilikinya tersebut, menjadikan perselisihan antara kedua kelompok.

Kekuasaan yang di dapat dari posisi-posisi yang mereka duduki dengan posisi tersebut maka otoritas atau kekuasaan akan muncul untuk menguasai

orang lain. Orang-orang yang menduduki posisi otoritas diharapkan bisa mengendalikan para subordinat. Pemerintah Desa selaku kelompok yang menduduki superordinate memiliki kuasa untuk memerintah kelompok masyarakat yang memiliki posisi sebagai subordinat. Sehingga menjadikan kelompok masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perintahnya, karena posisi subordinat yang dimilikinya.

Akibat dari perbedaan posisi otoritas ini mengakibatkan munculnya kelompok semu yang tercipta dengan kepentingan yang sama, bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi. Kesamaan kepentingan yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat dan Kepala Dusun Bedog untuk menginginkan penjelasan dari Pemerintah Desa terkait dengan perencanaan pembangunan wisata yang berada Dusun Bedog yang tidak melibatkan masyarakat dan Kepala Dusun Bedog. Sedangkan Pemerintah Desa selaku kelompok kepentingan memiliki alasan mengapa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wisata adalah Pemerintah Desa menginginkan pembangunan ini segera selesai agar nantinya bisa secepatnya menjadi pemasukan bagi desa, membantu pengangguran disekitar lokasi wisata dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.

Sampai saat ini, pembangunan wisata telah mencapai 50% pengerjaan. Rencana pembangunan wisata ini nantinya akan dibuat wahana permainan anak dan kolam pancing. Pada pembangunan wisata ini menggunakan tiga blok Tanah Kas Desa, diantaranya adalah Blok Bangunan dengan luas (2.524 Ha) atas nama Amat Wardoyo yang akan digunakan untuk Kolam Pancing, Blok

Wiyu dengan luas (1.043 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa digunakan untuk Rumah Bibit Pekarangan Pangan Lestari, dan Blok Lapangan dengan luas (0.427 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa akan digunakan untuk wahana permainan. Namun sampai saat ini, yang baru terealisasi hanya kolam pancing saja, untuk yang wahana permainan masih belum terealisasi karena menunggu Dana Desa turun. Sehingga pembangunan wisata belum bisa dilanjutkan.

### 5.1 Saran

Dari hasil penelitian mengenai dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat pada Pembangunan Wisata Desa, terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh peneliti:

### A. Untuk Pemerintah Desa Mlaten

Karena sampai saat ini konflik belum terselesaikan, maka Pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan konflik dengan konsiliasi maupun mediasi agar konflik segera selesai dan hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat khususnya Dusun Bedog bisa segera membaik.

# B. Untuk Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, salah satunya adalah peneliti tidak bisa mendapatkan SK Pembangunan Wisata dan hasil notulensi pada saat rapat RPJMDes yang mana hal ini sangat diperlukan pada penelitian ini. Semoga untuk penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan baik dan maksimal.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A. H. (2016). Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik Pesantren and Community Conflict Resolution. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1809.
- Akbar, M. A. (2018). PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT DI DUSUN SADE DESA REMBITAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH. 23–50. https://eprints.umm.ac.id/39878/3/BAB II.pdf
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Suprapto (ed.)). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Creswell. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Q. Saifuddin Zuhri (ed.); Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Dewi, P. A. (2016). DINAMIKA KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PENAMBANG EMAS DI GUNUNG TUMPANG PITU BANYUWANGI (STUDI KASUS DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI). 15(2), 1–23.
- Diurna, A., Iv, V., Perkembangan, A., Piungun, D., Gamelia, K., Lanny, K., & Papua, J. (2015). DAMPAK PENGGUNAAN HANDPHONE PADA MASYARAKAT Studi Pada Masyarakat Desa Piungun Kecamatan Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Papua Oleh: IV(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/862 2/8195
- Farid, R. (2015). KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PELAKU HOME INDUSTRY DI DESA TAMBAR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG. 31–40.
- Hajar, I. (2019). DINAMIKA KONFLIK PENAMBANG PASIR DENGAN NELAYAN DI MASYARAKAT DESA PADANGDANGAN. 9(1), 76–99. https://eprints.umm.ac.id/56640/3/BAB II.pdf
- Huda, M. A. I. N. (2018). KONFLIK DALAM POSDAYA "ASWAJA" DUSUN BORO SUMBERSARI DESA TAWANGARGO KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG. World Development, 1(1), 1–15
- Idawijayanti, T. (2014). PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah).
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 12–26.
- Krisnani, H., & Darwis, R. S. (2015). Pengembangan desa wisata melalui konsep community based tourism. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 341–346. http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13581/6411
- Moleong, L. J. (2008). *Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.
- Pioh, Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, N. R. (2017). KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

- (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.
- https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/16192/15696
- Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), 76–86. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1800/1412
- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk: Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01, 1–7.
- Rahawarin, Y. (2018). Peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik masyarakat di desa kumo kecamatan tobelo kabupaten halmahera utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 71–77.
- Rahayuningtyas, D. A. (2013). KONFLIK DAN POLA DEFIANCE WARGA PERWIRA DI KOMPLEK MILITER. *Paradigma*, 1, 1–7.
- Ramala, A. C. (2022). KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN CIVIL SOCIETY DALAM PENGEMBANGAN WISATA PETIK JERUK DESA SELOREJO KECAMATAN DAU TAHUN 2011-2013. 18–32. https://eprints.umm.ac.id/87617/4/BAB II.pdf
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (D. W. Adeputri (ed.); 8th ed.). Hill-McGraw.
- Romadhon, R. I. (2013). PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada UD. Bintang Shaela). 1–19.
- Sabillah, D. P. (2019). DINAMIKA KONFLIK SOSIAL ANTARA MASYARAKAT SEKITAR PABRIK DENGAN PABRIK GULA DJOMBANG BARU (STUDI DI DESA PULO LOR, KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR). 15(2), 1–23. https://eprints.umm.ac.id/51383/
- Salimudin, S. (2022). KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI LOKASI SIRKUIT MANDALIKA. 15(2), 1–23. https://eprints.umm.ac.id/87542/
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta (ed.)). Rineka Cipta.
- Suharto, M. P., & Basar, G. K. (2019). Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *1*(1), 55. https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20893
- Wardana, Y. S. (2020). PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI BERBASIS MASYARAKAT (Studi Pada Wisata Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar). 21–35. https://eprints.umm.ac.id/59586/3/bab 2.pdf